

ABSTRAK

PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2025

**Oleh
RAFFI ATHALLAH ADHYAKSA HASAN**

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak-hak pekerja, khususnya untuk menjamin penghasilan yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap pembayaran upah masih terjadi di berbagai perusahaan di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan UMP Tahun 2025. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan kesejahteraan pekerja dalam penerapan UMP di Provinsi Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan wawancara serta studi Pustaka dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif, baik secara rutin maupun insidental. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan jumlah pengawas, minimnya anggaran operasional, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, serta kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak normatifnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, kepatuhan perusahaan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, serta implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum agar penerapan UMP dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja.

ABSTRACT

SUPERVISION BY THE LAMPUNG PROVINCIAL MANPOWER OFFICE ON THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 PROVINCIAL MINIMUM WAGE

**By
RAFFI ATHALLAH ADHYAKSA HASAN**

The Provincial Minimum Wage (UMP) serves as a crucial regulatory instrument for safeguarding workers' rights, particularly in ensuring a decent standard of living as mandated by national labor legislation. Nevertheless, wage-related violations remain prevalent among companies in Lampung Province. This situation underscores the pivotal role of the Lampung Provincial Manpower Office in overseeing and enforcing compliance with the 2025 UMP regulations. This research examines two primary issues: (1) the scope of authority exercised by the Lampung Provincial Manpower Office in supervising the implementation of the 2025 UMP, and (2) the factors influencing the enhancement of workers' welfare in the context of UMP implementation in Lampung Province.

This study employs an empirical juridical research approach. Data were collected through interviews and literature review, while the analytical method used was qualitative descriptive analysis.

The research findings indicate that supervisory functions are carried out through preventative and repressive measures, conducted both routinely and on an incidental basis. However, the overall effectiveness of these measures is constrained by several challenges, including the limited number of labor inspectors, insufficient operational funding, low employer compliance, and inadequate awareness among workers regarding their normative rights. The study further finds that workers' welfare is influenced by regional economic conditions, employer compliance, human resource quality, supervisory effectiveness, and the implementation of employment social security programs. Strengthening supervisory capacity and law enforcement is therefore essential to ensuring the effective and optimal implementation of the UMP.

Keywords: Supervision, Provincial Minimum Wage, Manpower Office.